

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran secara umum merupakan salah satu permasalahan pokok ekonomi dalam ketenagakerjaan. Permasalahan ini hampir dialami oleh setiap negara, termasuk pada negara-negara maju, terlebih lagi pada negara berkembang seperti Indonesia ini. Pengangguran terjadi karena adanya jumlah angkatan kerja atau tenaga kerja yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Masalah pengangguran ini sangat penting, hal ini dikarenakan adanya pengangguran dapat mengakibatkan masalah sosial termasuk masalah sosial yang mempunyai hubungan dengan motif ekonomi. Jalannya perekonomian tidak dapat dihindarkan dari adanya masalah-masalah yang menjadi penyebab naik turunnya hasil dari sebuah perekonomian.

Pengangguran sendiri merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Jika masalah pengangguran tersebut tidak segera ditindaklanjuti maka dapat berdampak pada kerawanan sosial dan berpotensi pada penurunan tingkat pembangunan ekonomi.

Tingkat pengangguran merupakan kunci dari kinerja perekonomian. Tingkat pengangguran memberikan gambaran akan persentase dari angkatan

kerja yang tidak bekerja. Penurunan tingkat pengangguran merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan bagi pembangunan ekonomi. Permasalahan pengangguran ini perlu dilakukan pembahasan dan merupakan sebuah isu yang penting, karena hal ini berhubungan dengan beberapa indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang memberikan pengaruh terhadap tingkat pengangguran antara lain yaitu pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan dengan besaran upah yang berlaku.

Gambaran dari seberapa besar tingkat pengangguran ini, Badan Pusat Statistik menyajikan data dalam Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat pengangguran terbuka merupakan suatu jenis pengangguran yang tenaga kerjanya nyata-nyata tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan karena kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan, kemajuan teknologi mengakibatkan pengurangan dari tenaga kerja serta juga disebabkan karena kemunduran perkembangan dari suatu industri.

Menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi dikarenakan permintaan agregat yang rendah. Sehingga yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan dikarenakan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak bisa dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan menyebabkan kerugian, karena penurunan upah berarti akan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang-barang.

Pada akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan akan kesulitan untuk menyerap tenaga kerja.²

Tingkat pengangguran terbuka menjadi permasalahan pokok dalam suatu daerah maupun negara. Adanya jumlah angkatan tenaga kerja yang cukup besar, arus perpindahan penduduk serta adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, menyebabkan masalah tenaga kerja menjadi sulit untuk diselesaikan. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang penyebabnya berkaitan dengan upah, gaji, tingkat inflasi yang cenderung naik serta masalah ekonomi lainnya. Adanya pengangguran mengakibatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat menurun dan juga akan menyebabkan masalah kemiskinan dan masalah ekonomi lainnya.

Pengangguran terbuka merupakan sebuah komponen yang dijadikan ukuran dalam pembangunan wilayah negara Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu dalam bentuk provinsi, kabupaten dan kota. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mempunyai tingkat pengangguran terbuka dengan angka yang mengalami fluktuasi. Jawa Tengah sendiri mempunyai kabupaten dan kota terbanyak kedua setelah Jawa Timur yaitu sejumlah 35 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, yang mana tingkat pengangguran terbukanya berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

² Riza Ronaldo, Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia, *Jurnal Ekonomi*, Vol 21, No 2, 2019, hal. 399

Perbedaan tingkat pengangguran terbuka ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan angka selalu berubah setiap tahunnya baik mengalami peningkatan maupun penurunan. Berikut tabel yang menyajikan tingkat pengangguran terbuka dari 35 kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018-2021.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut 35 Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Cilacap	7.49	7.24	9.10	9.97
Kabupaten Banyumas	4.15	4.17	6.00	6.05
Kabupaten Purbalingga	6.02	4.73	6.10	6.05
Kabupaten Banjarnegara	3.99	4.44	5.86	5.86
Kabupaten Kebumen	5.48	4.69	6.07	6.03
Kabupaten Purworejo	4.43	2.91	4.04	3.59
Kabupaten Wonosobo	3.50	3.43	5.37	5.26
Kabupaten Magelang	2.89	3.07	4.27	5.03
Kabupaten Boyolali	2.18	3.09	5.28	5.09
Kabupaten Klaten	3.14	3.54	5.46	5.48
Kabupaten Sukoharjo	2.72	3.39	6.93	3.32
Kabupaten Wonogiri	2.28	2.55	4.27	2.43
Kabupaten Karanganyar	2.28	3.12	5.96	5.89
Kabupaten Sragen	4.83	3.32	4.75	4.76
Kabupaten Grobogan	2.22	3.54	4.50	4.38
Kabupaten Blora	3.30	3.82	4.89	3.81
Kabupaten Rembang	2.83	3.60	4.83	3.67
Kabupaten Pati	3.57	3.64	4.74	4.60
Kabupaten Kudus	3.28	3.80	5.53	3.77
Kabupaten Jepara	3.75	2.92	6.70	4.23
Kabupaten Demak	7.03	5.42	7.31	5.28
Kabupaten Semarang	2.25	2.54	4.57	5.02
Kabupaten Temanggung	3.23	2.98	3.85	2.62
Kabupaten Kendal	6.02	6.26	7.56	7.55
Kabupaten Batang	4.20	4.11	6.92	6.59

Lanjutan tabel...

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pekalongan	4.36	4.35	6.97	4.28
Kabupaten Pemalang	6.17	6.45	7.64	6.71
Kabupaten Tegal	8.24	8.12	9.82	9.97
Kabupaten Brebes	7.20	7.39	9.83	9.78
Kota Magelang	4.78	4.37	8.59	8.73
Kota Surakarta	4.35	4.16	7.92	7.85
Kota Salatiga	4.23	4.33	7.44	7.26
Kota Semarang	5.21	4.50	9.57	9.54
Kota Pekalongan	6.08	5.80	7.02	6.89
Kota Tegal	7.81	8.08	8.40	8.25

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/>

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah diatas memperoleh data Tingkat Pengangguran Terbuka dari periode 2018-2021. Dari data diatas dapat diketahui angka terendah tingkat pengangguran terbuka terendah terjadi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 yang menunjukkan angka 2.18% dan angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Tegal di tahun 2021 yang menunjukkan angka 9.97%. Data diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka selalu mengalami fluktuasi.

Fluktuasi tingkat pengangguran terbuka di atas dipengaruhi oleh banyak indikator. Permasalahan terhadap tingkat pengangguran terbuka sangat kompleks untuk dikaji serta merupakan salah satu isu yang menarik, hal ini karena mempunyai kaitan dengan beberapa indikator ekonomi. Beberapa indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka

diantaranya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Angkatan Kerja.

Indikator pertama yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengertian indeks pembangunan manusia diklasifikasikan oleh lembaga UNDP (*United Nation Development Program*) sebagai “Suatu proses untuk memperluas berbagai macam pilihan bagi penduduk”.³

Menurut teori Solow dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu berasal dari satu maupun lebih dari tiga faktor dari kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal serta teknologi. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia.⁴

Komponen indeks pembangunan manusia (IPM) terdiri dari tiga komponen yaitu: lamanya hidup, yang dapat diukur dari harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, yang diperoleh dengan menggabungkan antara angka melek huruf pada usia dewasa dengan bobot 2/3 dan rata-rata lamanya bersekolah yang ditempuh dengan bobot 1/3 dan tingkat kehidupan yang layak, ditinjau dari pengeluaran perkapita yang telah di sesuaikan (PPP Rupiah).

³ Radiatul Fadila dan Marwan, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018”, *Jurnal Ecogen*, Vol. 3 No. 1, 2020 hal 122

⁴ Irmayanti, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Polewali Mandar*, (Makasar: Repository UIN Alaudin Makasar, 2017), hal. 19-20

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka hal ini dikarenakan manusia tidak hanya sebagai obyek pembangunan akan tetapi juga diharapkan menjadi subyek sehingga mampu untuk ikut serta menyumbang kontribusi terhadap kemajuan suatu wilayah yang secara makro akan membawa pengaruh terhadap kemajuan suatu Negara. Peningkatan mutu sumber daya manusia ini diharapkan akan dapat berpengaruh terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka.

Pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat diketahui melalui pembangunan manusianya. Pemerintah mempunyai peran dalam hal peningkatan indeks pembangunan manusia, hal ini disebabkan karena akan dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi atau sebaliknya. Jika dalam pembangunan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Manusia mempunyai sebuah arti penting dalam pembangunan karena jika dilihat merupakan subyek pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat.

Tabel 1.2
Data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Indeks Pembangunan Manusia			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Cilacap	69.56	69.98	69.95	70.42
Kabupaten Banyumas	71.30	71.96	71.98	72.44
Kabupaten Purbalingga	68.41	68.99	68.97	69.15
Kabupaten Banjarnegara	66.54	67.34	67.45	67.86
Kabupaten Kebumen	68.80	69.60	69.81	70.05

Lanjutan tabel...

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Indeks Pembangunan Manusia			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Purworejo	71.87	72.50	72.68	72.98
Kabupaten Wonosobo	67.81	68.27	68.22	68.43
Kabupaten Magelang	69.11	69.87	69.87	70.12
Kabupaten Boyolali	73.22	73.80	74.25	74.40
Kabupaten Klaten	74.79	75.29	75.56	76.12
Kabupaten Sukoharjo	76.07	76.84	76.98	77.13
Kabupaten Wonogiri	69.37	69.98	70.25	70.49
Kabupaten Karanganyar	75.54	75.89	75.86	75.99
Kabupaten Sragen	72.96	73.43	73.95	74.08
Kabupaten Grobogan	69.32	69.86	69.87	70.41
Kabupaten Blora	67.95	68.65	68.84	69.37
Kabupaten Rembang	69.46	70.15	70.02	70.43
Kabupaten Pati	70.71	71.35	71.77	72.28
Kabupaten Kudus	74.58	74.94	75.00	75.16
Kabupaten Jepara	71.38	71.88	71.99	72.36
Kabupaten Demak	71.26	71.87	72.22	72.57
Kabupaten Semarang	73.61	74.14	74.10	74.24
Kabupaten Temanggung	68.83	69.56	69.57	69.88
Kabupaten Kendal	71.28	71.97	72.29	72.50
Kabupaten Batang	67.86	68.42	68.65	68.92
Kabupaten Pekalongan	68.97	69.71	69.63	70.11
Kabupaten Pemasang	65.67	66.32	66.32	66.56
Kabupaten Tegal	67.33	68.24	68.39	68.79
Kabupaten Brebes	65.68	66.12	66.11	66.32
Kota Magelang	78.31	78.80	78.99	79.43
Kota Surakarta	81.46	81.86	82.21	82.62
Kota Salatiga	82.41	83.12	83.14	83.60
Kota Semarang	82.72	83.19	83.05	83.55
Kota Pekalongan	74.24	74.77	74.98	75.40
Kota Tegal	74.44	74.93	75.07	75.52

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/>

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah diatas memperoleh data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari periode 2018-2021. Dari data diatas dapat diketahui bahwa Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) di 35 Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018-2021 terus mengalami perubahan. Angka terendah yakni terjadi pada kabupaten Pemalang ditahun 2018 yakni 65.67 dan tertinggi terjadi pada kota Salatiga ditahun 2021 yang menunjukkan angka 83.60.

Indikator lain yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya penambahan terhadap pendapatan perkapita. Dengan adanya penambahan perkapita memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi pada berbagai bidang. Pertumbuhan ekonomi dengan kata lain merupakan sebuah proses menuju perubahan pada orientasi yang lebih baik sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi barang maupun jasa pada suatu perekonomian yang dimanifestasikan mampu berpengaruh terhadap peningkatan bentuk pendapatan nasional pada suatu negara atau daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi diperlukan sebagai sumber untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dapat dilihat melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB dapat dimaknai sebagai nilai tambah bruto seluruh barang/jasa yang dihasilkan di suatu daerah yang mana sumbernya

didapat dari segala aktivitas dalam satu periode tertentu.⁵ Penelitian ini mengambil sampel data PDRB atas dasar konstan tahun 2010. PDRB atas harga konstan ini dinilai sesuai untuk dapat mengetahui laju pertumbuhan ekonomi. Berikut tabel data laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan 2010 menurut 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen),
2017-2021

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Cilacap	2.99	2.27	-10.28	2.15
Kabupaten Banyumas	6.45	6.32	-1.65	4.00
Kabupaten Purbalingga	5.42	5.64	-1.18	3.19
Kabupaten Banjarnegara	5.67	5.60	-1.32	3.26
Kabupaten Kebumen	5.53	5.52	-1.45	3.71
Kabupaten Purworejo	5.33	5.44	-1.61	3.31
Kabupaten Wonosobo	5.06	5.57	-1.64	3.68
Kabupaten Magelang	5.28	5.30	-1.67	3.48
Kabupaten Boyolali	5.72	5.96	-1.20	4.63
Kabupaten Klaten	5.47	5.48	-1.17	3.82
Kabupaten Sukoharjo	5.79	5.92	-1.70	3.82
Kabupaten Wonogiri	5.41	5.14	-1.41	3.35
Kabupaten Karanganyar	5.98	5.76	-1.87	3.57
Kabupaten Sragen	5.75	5.90	-1.81	3.75
Kabupaten Grobogan	5.83	5.37	-1.57	3.78
Kabupaten Blora	4.38	4.05	-4.56	3.68
Kabupaten Rembang	5.89	5.20	-1.49	3.85
Kabupaten Pati	5.71	5.81	-1.16	3.38
Kabupaten Kudus	3.24	3.09	-3.11	-1.54
Kabupaten Jepara	5.85	6.02	-1.92	4.63
Kabupaten Demak	5.40	5.36	-0.23	2.62
Kabupaten Semarang	5.67	5.39	-2.67	3.63

⁵ Si Nyoman Sudana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tabanan," *Jurnal Ilmiah Untab* 171, No. 1 (2020): 81–87.

Lanjutan tabel...

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Temanggung	5.13	5.05	-2.13	3.34
Kabupaten Kendal	5.77	5.71	-1.51	3.89
Kabupaten Batang	5.72	5.39	-1.29	4.88
Kabupaten Pekalongan	5.76	5.35	-1.89	3.54
Kabupaten Pemalang	5.69	5.80	-0.61	4.28
Kabupaten Tegal	5.51	5.56	-1.48	3.71
Kabupaten Brebes	5.26	5.76	-0.47	2.57
Kota Magelang	5.46	5.41	-2.45	3.20
Kota Surakarta	5.75	5.78	-1.76	4.01
Kota Salatiga	5.84	5.90	-1.68	3.35
Kota Semarang	6.48	6.81	-1.85	5.16
Kota Pekalongan	5.69	5.50	-1.87	3.59
Kota Tegal	5.87	5.77	-2.29	3.12

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/>

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah diatas memperoleh data Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari periode 2018-2021. Angka terendah yaitu terjadi pada kabupaten Cilacap yaitu -10.28 pada tahun 2020 angka tertinggi yaitu pada kota Semarang yaitu sebesar 6.81% pada tahun 2019. Data diatas dapat diketahui bahwa Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami kenaikan dan penurunan yang selalu berubah-ubah disetiap tahunnya.

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) sendiri yaitu tenaga kerja baik yang sedang bekerja, mencari pekerjaan atau pengangguran. Jumlah

angkatan kerja juga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun mencari kerja dan tergolong dalam usia produktif (15 – 64 tahun).⁶ Dapat diartikan mereka yang termasuk dalam bagian penduduk dan merupakan kategori produktif yang mana dalam hal ini sudah bekerja, maupun belum bekerja, akan tetapi dalam kondisi siap untuk bekerja.

Akselerasi penambahan jumlah penduduk pada setiap tahunnya akan memicu peningkatan jumlah angkatan kerja baru, dengan adanya lonjakan jumlah angkatan kerja baru akan berakibat pula pada persoalan pengangguran serta persoalan kependudukan. Semakin meningkat jumlah angkatan kerja baru, maka akan memicu bertambahnya jumlah pengangguran. Hal ini terjadi diakibatkan karena penambahan jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan perluasan lapangan kerja, apalagi jika jumlah penduduk yang semakin bertambah yang tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk, kualitas penduduk, struktur penduduk yang sebagian tergolong masih muda, selain itu modal serta kondisi teknologi yang dimiliki masih minim.

Pada angkatan kerja dapat dilihat dari besaran persentase penduduk yang termasuk dalam usia kerja aktif pada kegiatan ekonomi di suatu wilayah, yaitu dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menyajikan gambaran struktur dan keadaan

⁶ Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, (Yogyakarta: UU STIM YKPM, 2014), hal. 6

angkatan kerja pada masa mendatang.⁷ Berikut merupakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018-2021

Tabel 1.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2017-2021

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Cilacap	62.62	65.34	67.79	62.91
Kabupaten Banyumas	67.74	67.34	66.66	65.07
Kabupaten Purbalingga	70.58	68.14	69.89	69.52
Kabupaten Banjarnegara	71.97	70.09	69.69	69.76
Kabupaten Kebumen	65.75	68.72	69.63	67.76
Kabupaten Purworejo	66.89	66.81	70.05	73.29
Kabupaten Wonosobo	72.43	72.07	71.26	70.77
Kabupaten Magelang	71.48	74.73	76.60	75.78
Kabupaten Boyolali	72.31	72.70	75.11	75.79
Kabupaten Klaten	67.14	69.10	68.33	66.89
Kabupaten Sukoharjo	68.47	68.50	68.74	68.78
Kabupaten Wonogiri	75.22	69.86	74.69	73.09
Kabupaten Karanganyar	70.45	70.19	73.55	73.15
Kabupaten Sragen	67.23	67.71	68.44	71.74
Kabupaten Grobogan	70.79	69.25	69.77	72.88
Kabupaten Blora	72.99	68.54	71.90	70.54
Kabupaten Rembang	67.71	66.26	65.17	70.67
Kabupaten Pati	66.78	66.08	63.85	68.99
Kabupaten Kudus	72.37	72.05	74.50	74.77
Kabupaten Jepara	69.05	68.43	69.92	69.55
Kabupaten Demak	70.96	67.72	69.79	66.23
Kabupaten Semarang	72.50	74.69	75.07	74.10
Kabupaten Temanggung	74.11	76.23	58.73	74.01
Kabupaten Kendal	66.34	67.91	70.50	69.93
Kabupaten Batang	70.28	68.75	69.78	71.40

⁷ Amgi Filiasari dan Achma Hendra Setiawan, "Pengaruh Angkatan Kerja, Upah, PDRB, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2002-2019", *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol.10, No. 2, Tahun 2021, hal. 2

Lanjutan tabel...

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pekalongan	70.68	71.15	71.23	71.46
Kabupaten Pemalang	65.29	66.27	65.57	65.90
Kabupaten Tegal	65.41	66.50	66.52	66.24
Kabupaten Brebes	67.18	66.08	66.65	63.97
Kota Magelang	68.89	64.95	67.61	67.07
Kota Surakarta	66.01	69.27	68.84	66.89
Kota Salatiga	72.15	66.96	70.23	70.36
Kota Semarang	65.93	66.87	69.89	69.41
Kota Pekalongan	70.36	72.46	66.45	75.77
Kota Tegal	65.54	69.61	64.57	68.25

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/>

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah diatas memperoleh data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari periode 2018-2021. Dari data diatas dapat diketahui angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi terjadi pada kabupaten Magelang di tahun 2020 yang menunjukkan angka 76.60 %. Sedangkan angka terendah terjadi di kabupaten Temanggung yang menunjukkan angka 58.73% dan menjadi angka terendah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Tengah yang terjadi pada tahun 2020.

Alasan peneliti memilih lokasi di Jawa Tengah ini dikarenakan merupakan salah satu provinsi yang mempunyai kabupaten/kota terbanyak kedua setelah Jawa Timur. Provinsi ini mempunyai sejumlah 35 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Meskipun merupakan provinsi yang mempunyai kabupaten/kota yang cukup banyak, namun jika ditinjau dari segi tingkat pengangguran terbuka tergolong masih bersifat fluktuatif.

Data yang telah dilampirkan diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka selalu mengalami perubahan baik mengalami peningkatan ataupun penurunan, tentunya hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi dan mempunyai hubungan dengan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang mengalami fluktuasi.

Adapun peneliti mengambil topik tingkat pengangguran terbuka karena masalah pengangguran terbuka merupakan salah satu permasalahan yang kompleks untuk dibahas. Permasalahan ini menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan ekonomi terutama pada negara-negara berkembang. Keberhasilan upaya dalam mengatasi masalah besar ini akan berpengaruh terhadap stabilnya sosial politik dalam kehidupan masyarakat dan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah jangka panjang.

Besarnya angka yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di suatu negara merupakan faktor utama yang dapat digunakan acuan untuk mengukur kesuksesan dalam pembangunan ekonomi, dikarenakan pengangguran menjadi salah satu parameter utama dalam mengetahui kesejahteraan di dalam pembangunan ekonomi.

Keterbaruan penelitian ini bahwasannya tingkat pengangguran terbuka akan semakin menurun jika masalah-masalah dalam perekonomian semakin diminimalisir. Terdapat tiga faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Berikut data

tingkat pengangguran terbuka provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan dengan provinsi pada pulau jawa di empat tahun terakhir

Tabel 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka 6 Provinsi
Di Pulau Jawa (Persen)

Tahun	Jawa Timur	DIY	Jawa Tengah	Jawa Barat	DKI Jakarta	Banten
2018	3,91	3,35	4,47	8,23	6,24	8,47
2019	3,82	3,14	4,44	8,04	6,22	8,11
2020	5,84	4,57	6,48	10,46	10,95	10,64
2021	5,74	4,56	5,95	9,82	8,50	8,98

Sumber: <https://bps.go.id> (data diolah)

Dapat dilihat dalam tabel diatas merupakan angka yang menunjukkan kondisi 4 tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di 6 provinsi pada pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah termasuk ke dalam angka lebih rendah jika dibandingkan dengan tiga provinsi yang mempunyai letak geografis pada sebelah barat provinsi Jawa Tengah yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Namun, jika dibandingkan dengan dua provinsi yang terletak sebelah selatan dan timur yaitu Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua provinsi tersebut.

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah dalam empat tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Angka paling tinggi yaitu pada tahun 2020, yaitu sebesar, 6,48% yang mana keenam provinsi di pulau jawa semuanya mengalami peningkatan pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan banyak sektor terjadi pembatasan dalam berbagai kegiatan produktif. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan di provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,53%. Penurunan ini

mempunyai hubungan dengan beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yaitu indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan angkatan kerja.

Jika dalam suatu daerah indeks pembangunan manusianya semakin baik maka upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan akan semakin mudah untuk dicapai. Indeks pembangunan manusia ini merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk mengukur level/peringkat pembangunan dalam suatu daerah. Jika indeks pembangunan manusianya terus mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bukti upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat menunjukkan hasil baik yang signifikan.

Selain indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat juga akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap pengurangan tingkat pengangguran. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan riil masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berhasil jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu menunjukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka akan memudahkan dalam mencapai kemakmuran masyarakat dan kualitas standar hidup masyarakat semakin baik.

Selain indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, begitupun pada angkatan kerja. Setiap tahun jumlah penduduk akan mengalami peningkatan, dengan adanya kenaikan jumlah penduduk ini juga akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Jumlah angkatan kerja yang

semakin banyak ini, berarti semakin bertambah pula jumlah tenaga kerja produktif melalui tenaga kerja yang terampil. Hal ini diharapkan akan mampu memicu peningkatan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ahmad Sahlan Hadi, Westi Riani, dan Ria Haryatiningsih⁸, menggunakan analisis data panel dengan metode *Fixed Effect Model (FEM)*, menunjukkan hasil bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016-2020. Artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia maka tingkat pengangguran terbuka semakin rendah. Pada variabel upah minimum provinsi menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016-2020. Hal ini berarti semakin tinggi Upah Minimum Provinsi maka semakin tinggi juga tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan secara simultan variabel laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016-2020.

⁸ Ahmad Sahlan Hadi*, Westi Riani, Ria Haryatiningsih, “Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2016-2020”, *Bandung Conference Series: Economics Studies*, Vol. 2 No. 2 (2022), hal. 446-454

Penelitian terdahulu Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah⁹, menggunakan metode data panel, menunjukkan hasil bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) maka semakin kecil tingkat pengangguran. Secara bersama-sama Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini terlihat dari besarnya nilai F statistik yaitu 8.815659 dan nilai probabilitasnya sebesar $0.000002 < \text{taraf } 5\%$.

Penelitian terdahulu M. Arizal dan Marwan¹⁰ dengan menggunakan metode data panel menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto maka Tingkat Pengangguran Terbuka akan mengalami penurunan, dan juga sebaliknya jika Produk Domestik Regional Bruto mengalami penurunan maka Tingkat Pengangguran Terbuka akan mengalami peningkatan. Sedangkan pada variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat

⁹ Dwi Mahroji Dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten", *Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2019, hal. 51-72

¹⁰ M. Arizal dan Marwan, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat", *EcoGen Volume 2, Nomor 3*, Tahun 2019, hal. 433-442

Pengangguran Terbuka yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi persentase Indeks Pembangunan Manusia maka akan berpengaruh pada kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. Namun secara bersama-sama variabel Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2017.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menguji pengaruh antara indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka. Oleh sebab itu, penulis mencoba untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2018-2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan yang berbeda antara kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya.
2. Akselerasi pembangunan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya, hal ini

berpotensi memberikan pengaruh pada pengurangan tingkat pengangguran terbuka menjadi lebih menurun.

3. Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada PDRB atas harga konstan 2010 Provinsi Jawa Tengah yang fluktuatif dapat juga mempengaruhi tingkat pengangguran, karena hal ini mempunyai hubungan dengan tingkat produktivitas pada suatu wilayah. Jika mengalami peningkatan, maka akan banyak tenaga kerja yang terserap, dan begitu pula sebaliknya.
4. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang menunjukkan kenaikan dan penurunan juga akan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yang berakibat pada tidak stabilnya pembangunan ekonomi.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021?
2. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021?
3. Apakah ada pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021?
4. Apakah ada pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021.
2. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021.
3. Untuk menguji pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021.
4. Untuk menguji pengaruh pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah serta dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pembangunan ekonomi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta bahan kajian bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mengenai dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, serta dapat menjadi bahan masukan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka khususnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya yang mempunyai tujuan supaya penelitian dapat lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu dari sebuah objek. Selain itu, ruang lingkup dan batasan penelitian mempunyai tujuan untuk menghindari pembahasan yang melebar/meluas dari tema yang dikaji. Adapun variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Adapun variabel bebas meliputi, Indeks Pembangunan Manusia

(X_1), Pertumbuhan Ekonomi (X_2), dan Angkatan Kerja (X_3), sedangkan variabel terikatnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah (Y).

2. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian diantaranya:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja. Padahal sebenarnya terdapat banyak variabel independen yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.
- b. Keterbatasan waktu, tempat dan fikiran peneliti yang hanya menguji sumber data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.
- c. Jangka waktu periode penelitian terbatas hanya pada tahun 2018 sampai dengan 2021.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan suatu penjabaran makna dari suatu makna agar tidak terjadi kesalahan dan memberikan kemudahan pembaca dalam mengetahui arti atau pengertian pada suatu penelitian.

1. Definisi Konseptual

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang

masuk dalam kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) berdasarkan pada sebuah konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sudah bekerja sebelumnya.¹¹

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan sebuah indeks kerja pembangunan. Nilai dari IPM ini dapat diukur berdasarkan dari tiga indikator sebagai bahan acuannya, yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil perkapita berdasarkan varietas daya beli.¹²

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan fiskal terhadap produksi barang atau jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan terhadap jumlah produksi barang industri, meningkatnya perkembangan infrastruktur, bertambahnya jumlah sekolah, penambahan sektor jasa dan meningkatnya produksi barang modal.¹³ Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu.

d. Angkatan Kerja

¹¹ Syamsul Arifin Dan Yoyok Soesatyo, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Konsumsi Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hal. 26

¹² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan: Edisi ke-5* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010), hal. 46

¹³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hal. 423

Angkatan kerja menurut Tiandaru adalah sekumpulan orang dewasa yang sedang bekerja atau berusaha mencari pekerjaan.¹⁴

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini akan meneliti terkait seberapa besar pengaruh dari indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami gambaran lebih jelas tentang penelitian ini maka secara garis besar penulis menjelaskan tentang sistematika penulisan skripsi menjadi beberapa tahap yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran dan Abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari enam bab meliputi :

a. BAB I PENDAHULUAN

¹⁴ Syamsul Arifin, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Banyumas : Pena Persada, 2020), hal.23

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, batasan masalah, dan penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, yang memuat pengertian dan definisi, kajian penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data skala pengukuran, teknik pengumpulan data instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bagian ini berisikan analisa dan hasil pengolahan data melalui teknik analisis data yang digunakan dalam Bab III.

e. BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis pembahasan dan rumusan masalah. Dalam hal ini dijelaskan hasil dari rumusan masalah yang di angkat dari judul.

f. BAB VI KESIMPULAN

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian maupun pembahasan beserta saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Bukti Kendali Bimbingan Skripsi, Surat Pernyataan Keaslian Tulisan dan Daftar Riwayat Hidup.